

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Semarang

Halaman 27

Penyerapan Anggaran Masih 40%

ANGARAN - Hingga awal September 2017, APBD Penetapan 2017 baru terserap 40 persen. Padahal kalangan DPRD Kabupaten Semarang, telah berusaha mempercepat pembahasan anggaran sesuai regulasi.

Menyikapi hal itu Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto pun mendesak Bupati Semarang, Mundjirin untuk mendorong pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), supaya merealisasikan program yang sudah disusun sebelumnya.

"Bupati harus segera *mecuti* pimpinan OPD. Kalau ada kendala, cari solusi untuk mempercepat penyerapan anggaran," kata Bambang, usai Rapat Paripurna DPRD, Kamis (31/8) kemarin.

Untuk mengetahui realisasi

penyerapan anggaran, pihaknya dalam waktu dekat hendak meminta Laporan Pelaksanaan APBD Penetapan 2017 dari eksekutif. Untuk rencana pembangunan Pasar Suruh yang tidak disetujui DPRD, dia mengatakan anggaran pembangunan pasar tersebut senilai Rp 6 miliar tidak masuk struktur APBD 2017.

"Kami menginginkan Pasar Suruh dibangun menyeluruh, dengan dana APBD 2018, sehingga 2017 ini dianggarkan Rp 200 juta untuk keperluan menyusun DED-nya. Tetapi ada dana Rp 6

miliar dari pusat, dan itu malah dialokasikan ke Pasar Suruh," jabarnya.

Hasil Konsultasi

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong, menambahkan ketika Komisi B berkonsultasi ke Kementerian Perdagangan, diketahui bahwa dana pembangunan pasar Rp 6 miliar tadi bagian dari pembangunan 1.000 pasar se-Indonesia, salah satunya untuk Kabupaten Semarang.

Tujuannya untuk membuat percontohan pasar tradisional yang moderen.

"Eksekutif mengalokasikan Rp 6 miliar untuk Pasar Suruh, padahal dana itu tidak cukup. Akhirnya mereka mengajukan tambahan anggaran Rp 8 miliar ke DPRD. Ketika dikonsultasikan dengan Kementerian Perdagangan tidak boleh, sehingga DPRD

khususnya Komisi B minta ditinjau ulang. Dalam Rapat Banggar DPRD tidak disetujui, ini termasuk bentuk kehati-hatian DPRD," ungkapnya.

The Hok pun kembali mempertanyakan mengapa penyerapan APBD 2017 bisa rendah. Dia bersama anggota dewan lainnya berkali-kali telah mengingatkan hal itu kepada eksekutif. Menurutnya, tugas DPRD adalah pengawasan, bukan pelaksana.

"Kami ingin tahu mengapa APBD baru terserap 40 persen, padahal sudah masuk September 2017. Belum lagi nanti ada APBD Perubahan 2017," tegasnya.

Di sisi lain, Bupati Semarang Mundjirin mengakui penyerapan anggaran memang lambat, karena ada beberapa kendala. Meliputi adanya Bantuan Gubernur dan Kementerian yang belum dikerjakan. Semisal pembangunan

Pasar Suruh senilai Rp 6 miliar tidak dilaksanakan imbas DPRD Kabupaten Semarang tidak menyetujui.

"Penyerapannya jelas tidak bisa 100 persen. Belum lagi ada kegiatan lainnya yang tidak mungkin dilaksanakan. Seperti pembangunan Puskesmas Bringin tidak bisa dilaksanakan, karena menempati bangunan purbakala yang tidak boleh dibongkar," kata Bupati.

Sebagai langkah percepatan, dia meminta pimpinan OPD tidak ragu untuk berkonsultasi ke Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Adanya LSM yang mengancam atau mengintimidasi pengguna anggaran dengan meminta sejumlah uang, menurut Bupati Mundjirin, juga turut andil memperlambat penyerapan anggaran. (H86-51)